

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hasan, A. Madjedi, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Penerbit PT Fikahati Aneska, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2013, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan X, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima Cetakan Ketiga, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua Cetakan Keenam, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Pudyantoro, A. Rinto, 2013, *A to Z Bisnis Hulu Migas*, Petromindo, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi Cetakan ke-35, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis: Perusahaan Grup di Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Makalah:

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Kekayaan Negara, 2015, SEMINAR, Jakarta.

Sampe L. Purba, 2012, *Pemerintah-BPMIGAS-KKKS: Inter Relasi Konstruksi Hubungan Hukum*, Forum Ekonomi dan Keuangan, Bandung.

Triatmodjo, Marsudi, 2013, *Materi Perkuliahan: Teori Hukum*, Jakarta, Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Jakarta, Jakarta.

Kontrak:

Production Sharing Contract, Generasi Penandatanganan Tahun 1992.

Production Sharing Contract, Generasi Penandatanganan Tahun 2005.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1971).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kerja Sama Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2002).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012).

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2013).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.05/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, (Jakarta: Kementerian Keuangan, 2012).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/73/MEM/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3136 K/73/MEM/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Pekerja yang Menjabat sebagai Wakil Kepala dan Deputi pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Pengadilan/Mahkamah:

Mahkamah Konstitusi, 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, Jakarta.

Pedoman Tata Kerja:

BPMIGAS, 2009, *Pedoman Tata Kerja Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama*, Jakarta.

SKK Migas, 2015, *Pedoman Tata Kerja Nomor PTK-033/SKKO0000/2015/S0 Revisi ke-02 tentang Placed Into Service (PIS)*, Jakarta.

SKK Migas, 2015, *Pedoman Tata Kerja Nomor: PTK-059/SKKO0000/2015/S0 tentang Kebijakan Akuntansi Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta.

Laporan:

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Buku 2011, 2012, 2013, dan 2014.